



**Survei Semesta Dunia Usaha:**  
**Koreksi Pengelolaan**  
**Program MBG**

# Daftar Isi

---

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi                                                                    | 2  |
| Survei Semesta Dunia Usaha: Koreksi Pengelolaan Program MBG                   | 3  |
| Mayoritas Responden Nilai MBG Belum Sesuai Harapan, Koreksi<br>Tata Kelolanya | 6  |
| Hendri Saparini: Jadikan MBG sebagai Hub Program Pemerintah                   | 17 |
| Pembenahan Program MBG: Perlu Mapping dan KPI                                 | 21 |



# Survei Semesta Dunia Usaha: Koreksi Pengelolaan Program MBG



*Petugas memperlihatkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) saat peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Pondok Pesantren Al Amien, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (29/9/2025). Foto: Antara/Prasetia Fauzani/rwa.*

**Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi persoalan yang cukup berat. Banyak anak didik penerima manfaat MBG keracunan hingga mengarah pada kejadian luar biasa. Mayoritas responden Survei SUAR menilai pengelolaan program unggulan pemerintah ini perlu dikoreksi.**

Penulis: Gianie

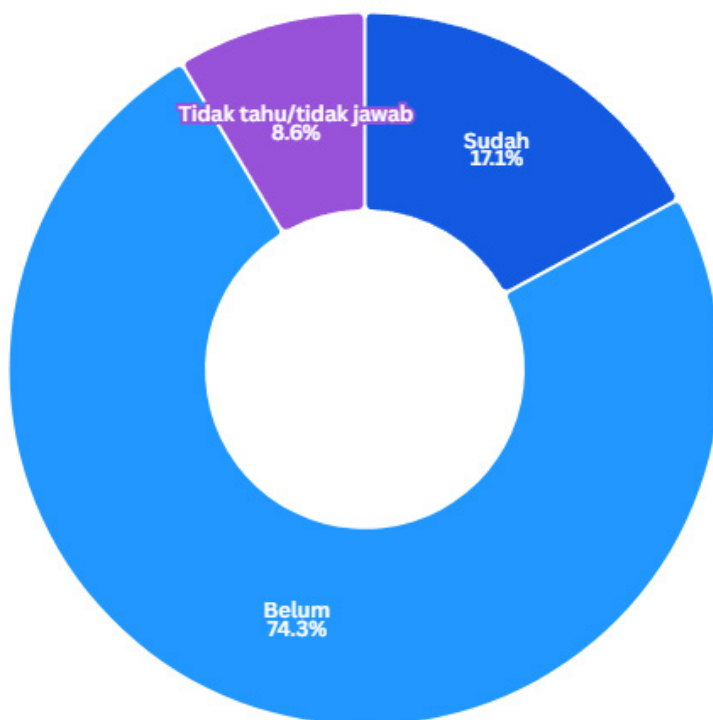
Tujuan pemerintah untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Alih-alih menyehatkan, anak didik penerima manfaat MBG banyak yang keracunan setelah memakan menu MBG hingga mengarah pada kejadian luar biasa.

Evaluasi terhadap pelaksanaan yang telah berjalan 9 bulan ini mendesak dilakukan. Tim SUAR menggali pemikiran para pengambil keputusan atau pemimpin di perusahaan serta pengamat ekonomi terkait pelaksanaan program MBG melalui Survei Semesta Dunia Usaha.

Program MBG ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran, mulai dari siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, santri pesantren, peserta PKBM dan SLB, seminari, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Hingga akhir September, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan jumlah penerima manfaat MBG sudah mencapai 31 juta anak. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga September ini jumlahnya tercatat 9.615 unit di seluruh Indonesia.

## Pendapat mengenai apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan sesuai yang diharapkan



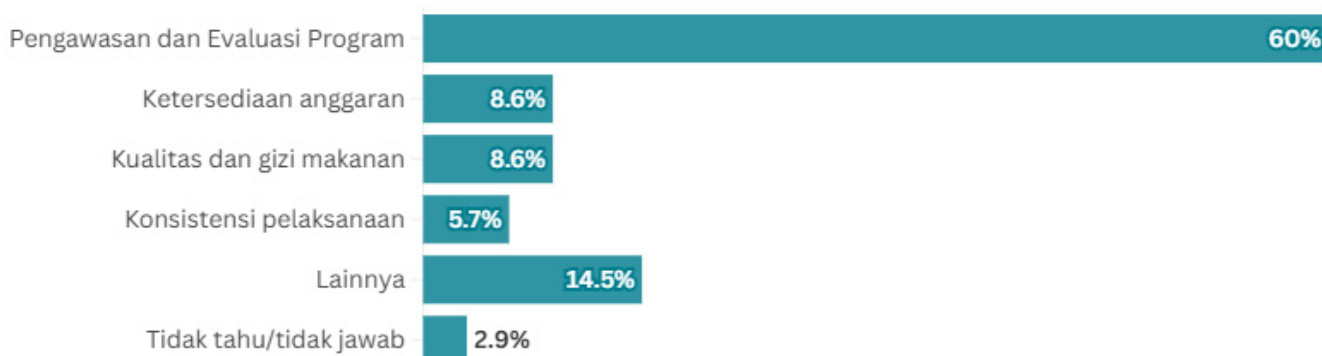
n = 35

**SUAR** SOLUTION JOURNALISM  
AND EXPECTIVES

Beberapa temuan:

- Narasumber yang terdiri atas para pengambil keputusan di perusahaan dan pengamat ekonomi mayoritas (74,3%) berpendapat bahwa program MBG belum berjalan sesuai yang diharapkan.
- Alasan utamanya adalah kualitas makanan yang buruk (46,2%) dan masih banyak anak yang belum menerima manfaat (23,1%), terutama yang di daerah terpencil.
- Narasumber memahami bahwa tujuan program MBG adalah memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia dan meringankan beban keluarga dalam menyajikan makanan bergizi.
- Namun, pelaksanaannya yang berbiaya sangat besar itu belum dianggap berhasil dalam empat hal. Yakni, dalam mengembangkan UMKM, memberdayakan pangan lokal, menggerakkan koperasi, dan meringankan beban keluarga.
- Agar berkelanjutan, program MBG harus diawasi dengan ketat, mencakup penyediaan bahan makanan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian. Evaluasi kegiatan juga perlu dilakukan secara periodik dan menyeluruh untuk memperbaiki celah-celah yang masih kurang. Sebanyak 60% responden menekankan soal pengawasan dan evaluasi ini.

## Faktor agar MBG bisa berjalan dengan baik



n = 35

**SUAR** SOLUTIONS JOURNAL  
for EXECUTIVES

Narasumber menyatakan pelaksanaan program MBG harus jelas target yang disasar. Penggunaan anggarannya pun harus lebih efisien mengingat Indonesia memiliki keterbatasan fiskal.

Menurut pakar, program MBG harus bisa menjadi 'hub' bagi program pemerintah yang lain. Mulai dari penyedia bahan makanan (terutama pangan lokal), hingga penciptaan lapangan kerja, baik itu melalui pengembangan UMKM maupun koperasi. Dengan demikian, program MBG memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar.

Banyak yang harus dibenahi jika program MBG bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan hingga menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada kuantitas, tapi juga kualitas. Tidak pula hanya fokus pada anak didik penerima manfaat, tapi juga pada tenaga pelaksana yang menyajikan menu makanan.

Evaluasi harus dilakukan terhadap semua aspek dan semua pemangku kepentingan.



# Mayoritas Responden Nilai MBG Belum Sesuai Harapan, Koreksi Tata Kelolanya



*Sejumlah siswa mengambil paket makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat dibagikan di SMP Negeri 9 Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/9/2025). (ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc)*

Baru berjalan 9 bulan, banyak kalangan mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, menuntut segera dilakukan moratorium setelah ribuan anak penerima manfaat menjadi korban karena keracunan makanan.

Penulis: Gianie

Tim SUAR menggali pemikiran para pengambil keputusan atau pemimpin di perusahaan serta pengamat ekonomi terkait pelaksanaan program MBG melalui Survei Semesta Dunia Usaha.

## Highlight:

- Mayoritas responden (74,3%) sependapat menyatakan bahwa program MBG belum berjalan sesuai yang diharapkan.
- Alasan utamanya adalah kualitas makanan buruk (46,2%) dan masih banyak anak belum menerima manfaat (23,1%), terutama yang berlokasi di daerah terpencil.
- Sebagian kecil responden menyatakan program MBG sudah berjalan dengan baik lantaran melihat dari jumlah penerima manfaat yang semakin bertambah (50%).
- Responden memahami bahwa tujuan program MBG adalah memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia (37,1%) dan meringankan beban keluarga dalam menyajikan makanan bergizi (25,7%).
- Namun, pelaksanaannya yang berbiaya sangat besar itu belum dianggap berhasil dalam empat hal. Yaitu, mengembangkan UMKM, memberdayakan pangan lokal, menggerakkan koperasi, dan meringankan beban keluarga.
- Agar berkelanjutan, program MBG harus diawasi dengan ketat, terkait penyediaan bahan makanan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian. Evaluasi kegiatan juga perlu dilakukan secara periodik dan menyeluruh untuk memperbaiki celah-celah yang masih kurang. Sebanyak 60% responden menekankan soal pengawasan dan evaluasi ini.
- Pihak swasta bisa mengambil peran membantu pelaksanaan program MBG dengan menjadi mitra pemerintah dalam menyajikan makanan (SPPG) atau menyuplai bahan makanan. Hanya sedikit responden (8,6%) yang menyarankan pihak swasta ambil bagian dalam hal pembiayaan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi (AKG) harian. Harga per porsi MBG dengan gizi yang dianggap cukup itu ditetapkan sebesar Rp 10.000.

Anggaran sebanyak Rp 71 triliun disiapkan untuk pelaksanaan program MBG tahun 2025 ini. Oleh karena target penerima manfaat dan tenaga pelaksana akan terus ditambah,

anggaran tahun 2026 melonjak menjadi Rp 335 triliun. Hingga akhir September ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan jumlah penerima manfaat MBG sudah mencapai 31 juta anak.

Dalam menyajikan makanan langsung ke meja siswa di sekolah, pemerintah membentuk mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlahnya hingga September ini sudah tercatat 9.615 unit SPPG di seluruh Indonesia. Pelaku usaha yang menjadi mitra pemerintah perlu menyediakan lahan untuk membangun dapur berukuran 20 meter x 20 meter.





*Petugas SPPG menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (23/9/2025). (ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/foc).*

## Masih jauh dari harapan

Program MBG yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025 ini membuka ruang bagi khalayak umum untuk menilai. Namun, selama 9 bulan berjalan ini, kesan yang diterima masyarakat masih jauh dari rasa puas. Hal itu terutama karena banyaknya pemberitaan mengenai kasus anak keracunan di sekolah setelah menyantap sajian MBG.

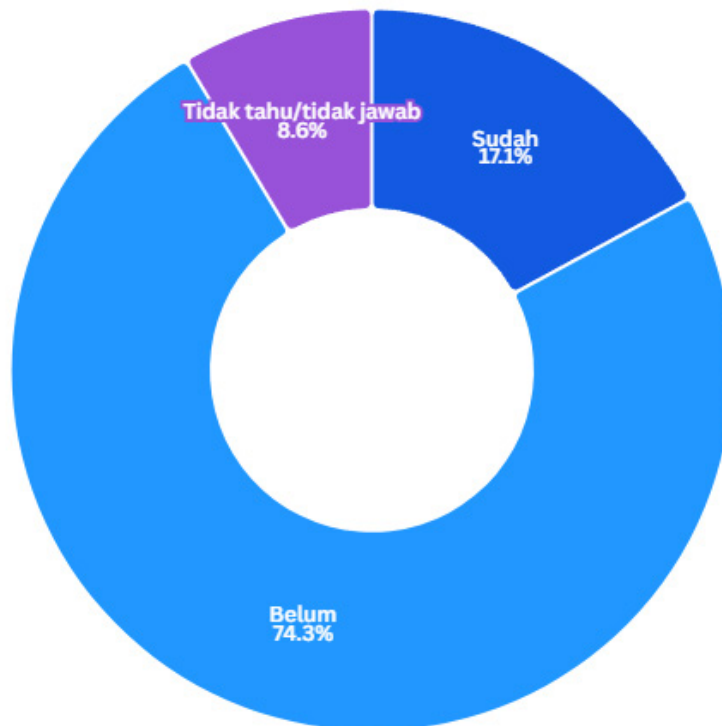
Pemerintah terkesan belum siap melaksanakan program MBG jika dilihat dari infrastruktur dan sumber daya manusia pelaksananya. Kondisi ini terpotret dalam Survei Semesta Dunia

Usaha yang menjaring pendapat para pengambil keputusan di perusahaan dan sejumlah pengamat ekonomi pada periode 9 September–25 September lalu.

Mayoritas responden (74,3%) menyatakan bahwa program MBG belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hanya 17,1% yang menyatakan sebaliknya.



## Pendapat mengenai apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan sesuai yang diharapkan



n = 35

**SUAR** SOLUTION JOURNALISM  
AND EXECUTIVES

Program MBG yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025 ini membuka ruang bagi khalayak umum untuk menilai. Namun, selama 9 bulan berjalan ini, kesan yang diterima masyarakat masih jauh dari rasa puas. Hal itu terutama karena banyaknya pemberitaan mengenai kasus anak keracunan di sekolah setelah menyantap sajian MBG.

Pemerintah terkesan belum siap melaksanakan program MBG jika dilihat dari infrastruktur dan sumber daya manusia pelaksananya. Kondisi ini terpotret dalam Survei Semesta Dunia

Usaha yang menjaring pendapat para pengambil keputusan di perusahaan dan sejumlah pengamat ekonomi pada periode 9 September–25 September lalu.

Mayoritas responden (74,3%) menyatakan bahwa program MBG belum berjalan sesuai yang diharapkan. Hanya 17,1% yang menyatakan sebaliknya.

*Program MBG menjangkau berbagai kelompok sasaran, mulai dari PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, santri pesantren, peserta PKBM dan SLB, seminari, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.*

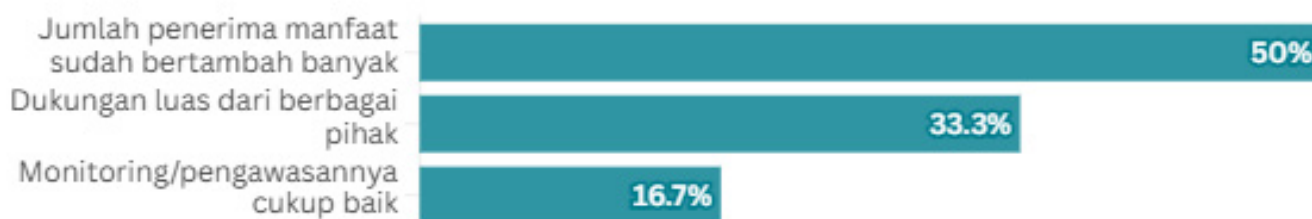
elain itu, responden juga menilai program MBG belum tepat sasaran kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan (15,4%). Hal ini lantaran setiap anak di sekolah mendapatkan jatah MBG tanpa memandang status gizinya.

Dari keterangan Badan Gizi Nasional, program MBG menjangkau berbagai kelompok sasaran, mulai dari PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, santri pesantren, peserta PKBM dan SLB, seminari, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Adapun responden yang menilai program MBG sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah (50%). Hal ini menunjukkan pemerintah benar-benar bekerja untuk mencapai target sasaran.

Selain itu, program ini pun didukung oleh banyak pihak (33,3%). Di samping dukungan dari sekolah, juga dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, nelayan, dan sebagainya.

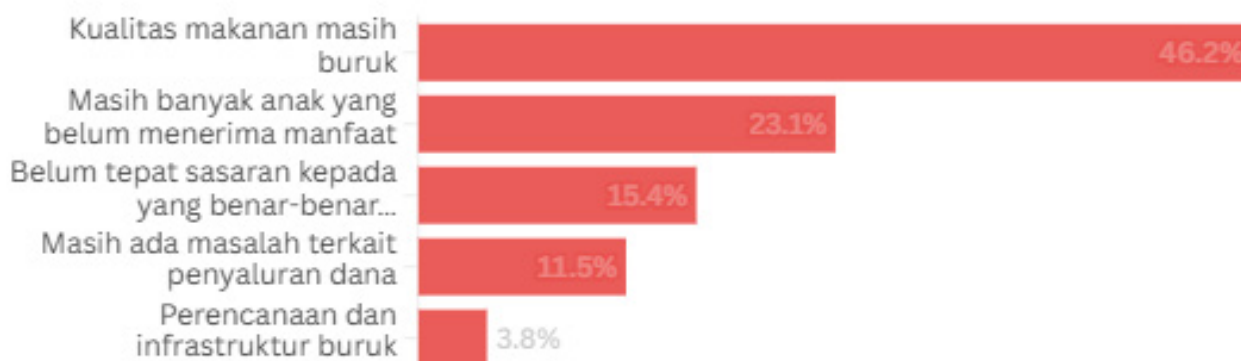
## Alasan MBG sudah berjalan sesuai yang diharapkan



n = 35

**SUAR** SOLUTIONS IN A RURAL ENVIRONMENT

## Alasan MBG belum berjalan sesuai yang diharapkan



n = 35

**SUAR** SOLUTIONS IN A RURAL ENVIRONMENT



Responden memahami bahwa tujuan program MBG ini mulia. Yakni, memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia (37,1%), yang berarti pula mempersiapkan masa depan anak-anak Indonesia menjadi lebih baik. Dengan memberi makanan anak-anak di sekolah, program ini juga sekaligus diharapkan dapat meringankan beban keluarga dalam menyajikan makanan bergizi (25,7%).

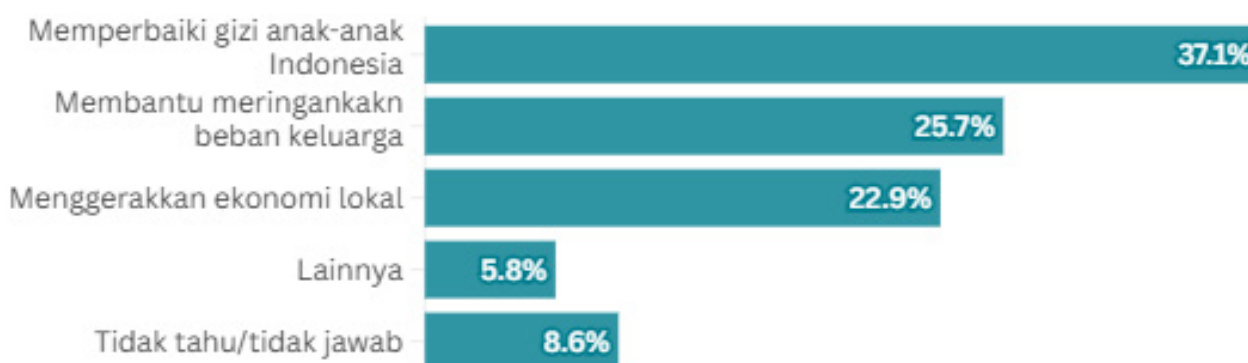
Banyak laporan menyebutkan bahwa anak yang mendapat makanan bergizi cukup pada saat mengikuti proses belajar memiliki tingkat konsentrasi yang lebih baik, bisa lebih berenergi, bersemangat, hingga berperilaku lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan prestasi akademik dan secara jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing sebagai bangsa.

*Secara ekonomi, penyediaan MBG akan meningkatkan permintaan bahan makanan sehingga akan mendorong tumbuhnya pasokan. Penyediaan pasokan bahan makanan ini akan menggerakkan perekonomian.*

Selain itu, sebanyak 22,9% responden menyatakan program MBG dapat menggerakkan perekonomian. Secara ekonomi, penyediaan MBG akan meningkatkan permintaan bahan makanan sehingga akan mendorong tumbuhnya pasokan. Penyediaan pasokan bahan makanan ini akan menggerakkan perekonomian.

Meningkatnya permintaan dan pasokan ini pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja. Ini menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memperkirakan tambahan Rp 71 triliun untuk program MBG pada tahun 2025 akan menyumbang 0,86 persen terhadap produk domestik bruto.

## Manfaat Utama Program MBG



n = 35

**SUAR** SOLUTIONS INNOVATION & EFFECTIVENESS

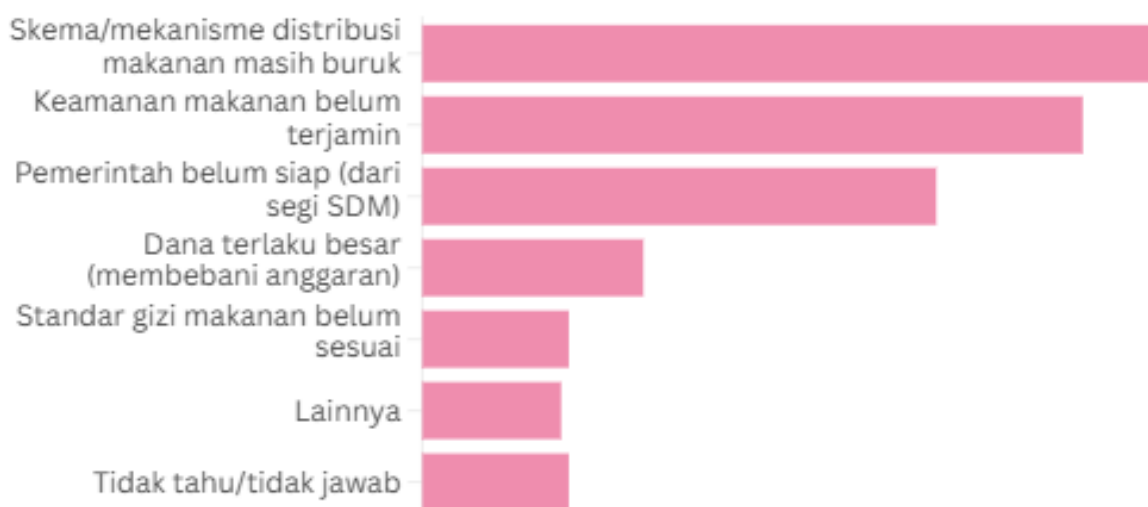
Oleh karena itu, program MBG memiliki arti penting sehingga harus dijalankan dengan baik dan berkelanjutan. Sayangnya, responden juga melihat sejumlah kelemahan pada pelaksanaan program MBG ini.

Kelemahan itu antara lain mekanisme distribusi makanan yang masih buruk (28,6%) yang berujung pada hampir 6.000 anak didik mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Biang persoalan disinyalir karena jarak antara waktu memasak menu dengan waktu distribusi dan waktu disantap oleh siswa yang terlalu lama. Untuk itu, perlu memperpendek rantai distribusi.

Juga soal keamanan dan higienitas makanan belum terjamin (25,7%). Pemerintah dinilai belum siap melaksanakan program MBG (20%) terutama dalam menyiapkan tenaga pelaksana yang terampil dan mengerti standar keamanan makanan dan gizi.

Selain itu, program ini juga dikhawatirkan dapat membebani keuangan negara karena alokasi anggarannya yang terlalu besar (8,6%). Dana yang besar ini juga memiliki celah terjadinya penyelewengan atau korupsi.

## Kelemahan program MBG



n = 35

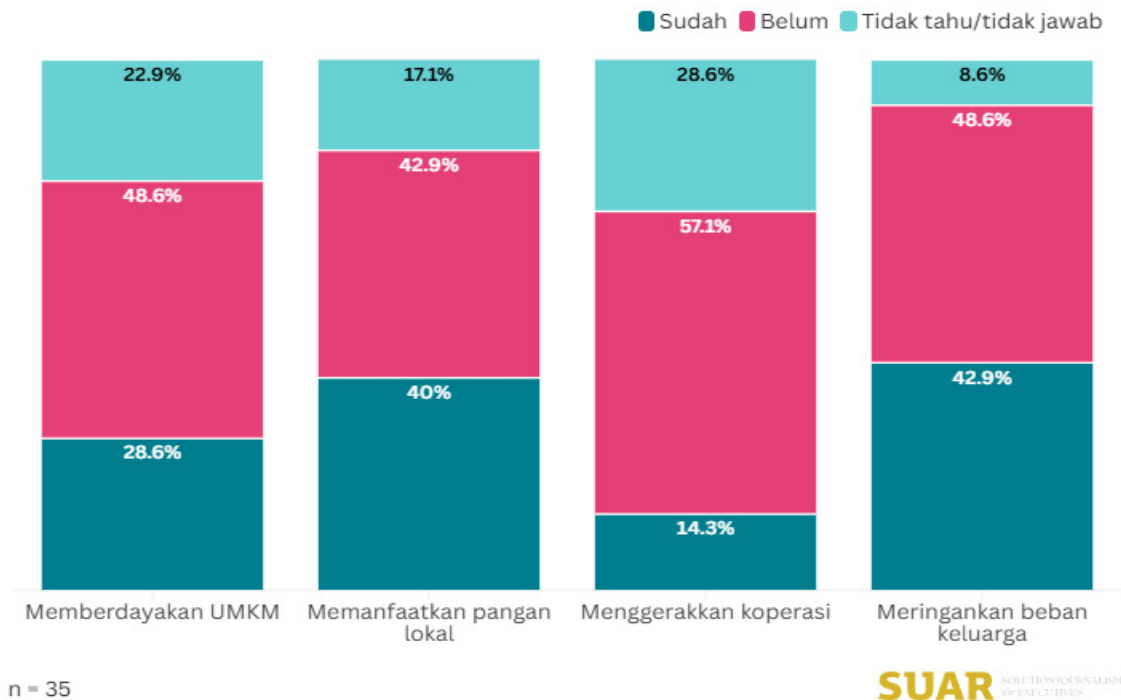
**SUAR** SOLUSI TRANSFORMASI BERKUALITAS

Dalam pelaksanaannya yang masih terbilang singkat ini, program MBG yang diharapkan dapat memberi dampak berganda yang besar belum sepenuhnya terealisasi. Responden menilai penyediaan makanan untuk program MBG belum memberdayakan pelaku UMKM (48,6%) dan belum pula memanfaatkan pangan lokal (42,9%).

Selain itu, program MBG juga belum

sepenuhnya menggerakkan koperasi (57,1%) terkait penyediaan bahan makanan. Bahkan, program ini juga belum dianggap bisa meringankan beban keluarga (48,6%). Hal itu karena nilai makan gratis di sekolah ini sebesar Rp 10.000 per porsi sekali makan. Sementara biaya pemulihan kesehatan jika terjadi masalah kesehatan justru lebih besar.

## Pendapat apakah MBG sudah terkait 4 hal berikut



## Faktor yang harus diperhatikan

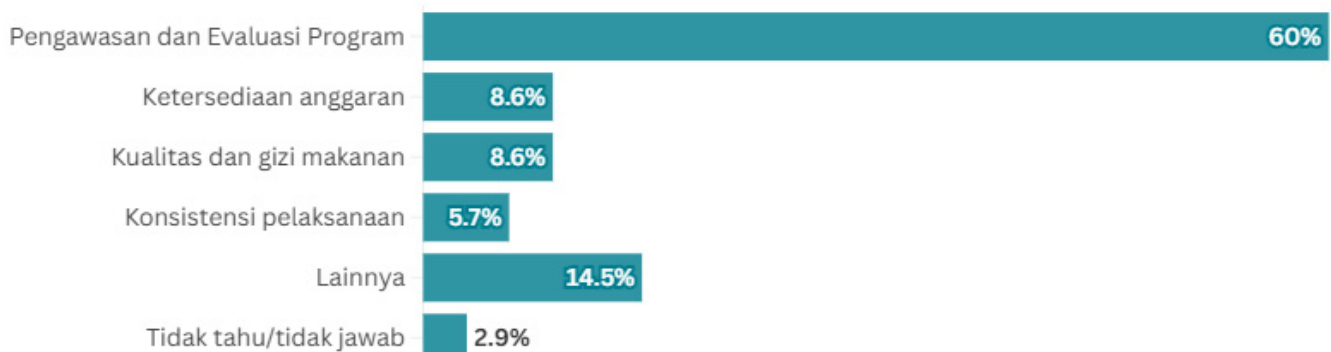
Program MBG akan bisa berjalan dengan baik jika pemerintah berdasarkan pengalaman pelaksanaan selama 9 bulan ini melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh (60%). Tujuannya tentu saja agar masalah-masalah yang terjadi selama ini bisa lebih diminimalisir dan target dampak berganda program ini secara ekonomi dapat tercapai.

Standar operasional prosedur (SOP) terkait pengadaan dan distribusi

makanan harus dibuat untuk standardisasi pelaksanaan di seluruh Indonesia. Pun, vendor atau mitra SPPG harus memiliki sertifikat kelayakan dalam beroperasi.

Selain itu, ketersediaan anggaran untuk kesinambungan program ini juga perlu diperhatikan (8,6%). Termasuk menjaga kualitas dan gizi makanan bagi anak didik (8,6%).

## Faktor agar MBG bisa berjalan dengan baik



n = 35

**SUAR** SOLUTION JOURNALISM OF EXECUTIVES

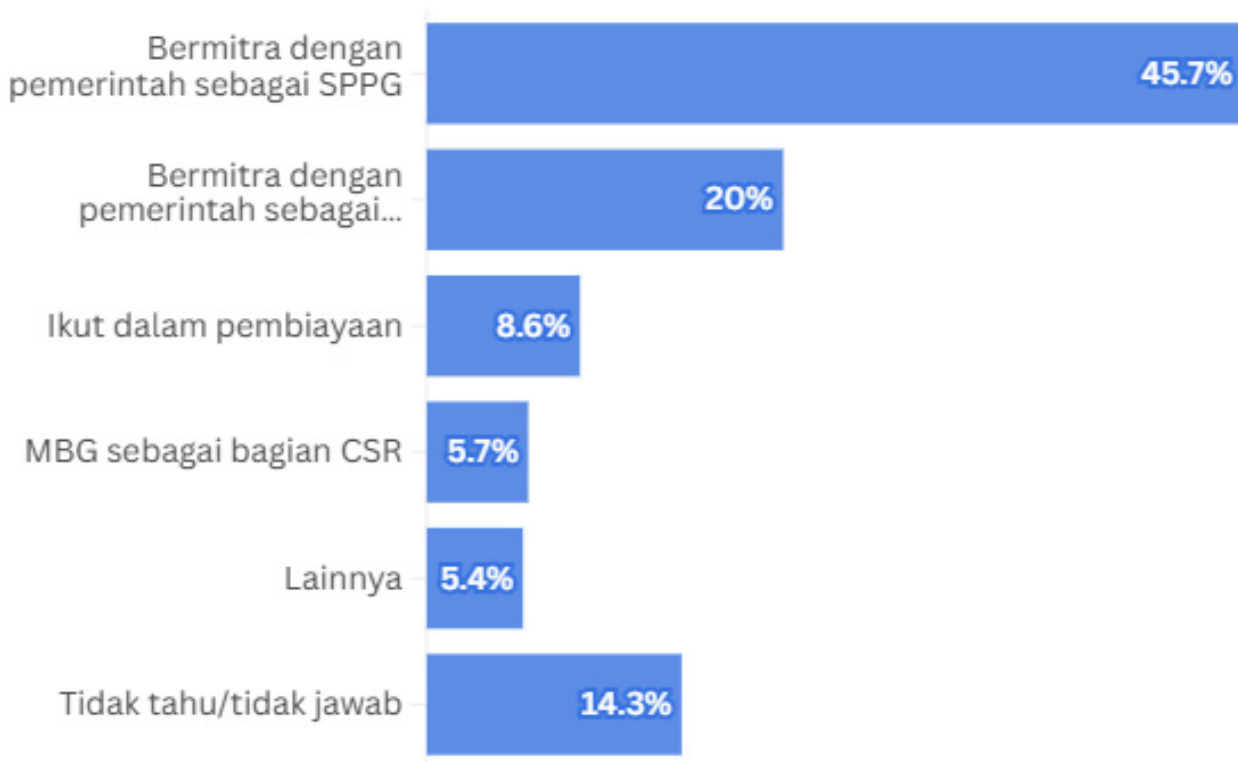


Dalam kondisi program MBG yang belum berjalan sesuai yang diharapkan ini, pihak swasta bisa berperan lebih besar. Pihak swasta bisa terlibat dalam setiap rantai pasok penyediaan bahan makanan dan memperpendek rentang distribusi makanan ke sekolah. Dengan demikian, dampak berganda ekonomi MBG bisa lebih besar hingga menciptakan lapangan kerja.

Sebanyak 45,7% responden menyatakan swasta bisa menjadi

mitra pemerintah sebagai SPPG atau sebagai penyuplai bahan baku makanan (20%). Soal keterlibatan swasta dalam pembiayaan belum sepenuhnya disetujui oleh responden. Hanya sebagian kecil saja (8,6%) yang menyarankan pihak swasta ikut dalam pembiayaan program MBG atau dengan menjadikan program ini sebagai tujuan atau wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (5,7%).

## Peran yang dapat dilakukan pihak swasta dalam mendukung program MBG



n = 35

**SUAR** SOLUTION JOURNALISM  
OF EXECUTIVES

Banyak yang harus dibenahi jika program MBG bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan hingga menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada kuantitas, tapi juga kualitas. Tidak pula hanya fokus pada anak didik penerima manfaat,

tapi juga pada tenaga pelaksana yang menyajikan menu makanan.

Evaluasi harus dilakukan terhadap semua aspek dan semua pemangku kepentingan. Keselamatan anak harus menjadi prioritas.



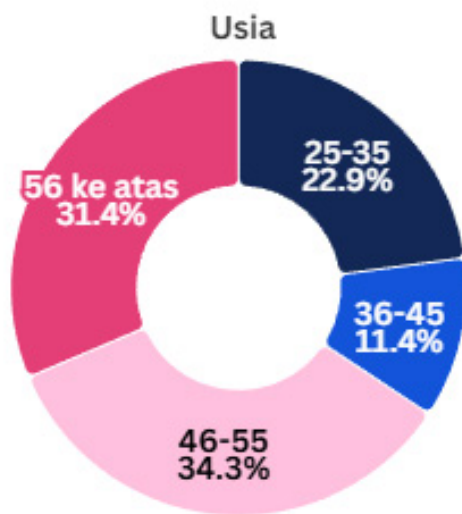
*Pelajar membawa paket makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 42, Banda Aceh, Aceh, Kamis (11/9/2025). (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra).*

# Metodologi dan Profil Narasumber

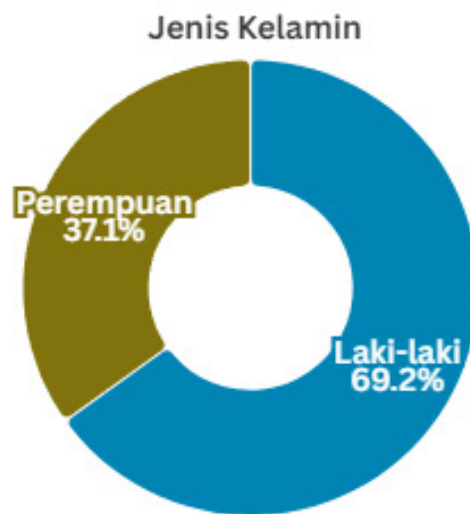
Survei Semesta Dunia Usaha dilakukan pada 9 September–25 September 2025. Sebanyak 35 narasumber (responden) dipilih secara purposive sampling dari kalangan dunia usaha dan pengamat ekonomi.

Dari kalangan dunia usaha, posisi narasumber beragam, mulai dari direktur, direktur utama, hingga owner. Usia narasumber berada di rentang 25–75 tahun. Tingkat pendidikan narasumber didominasi oleh S1 (48,6%) dan S2/S3 (45,7%).

## Profil Narasumber

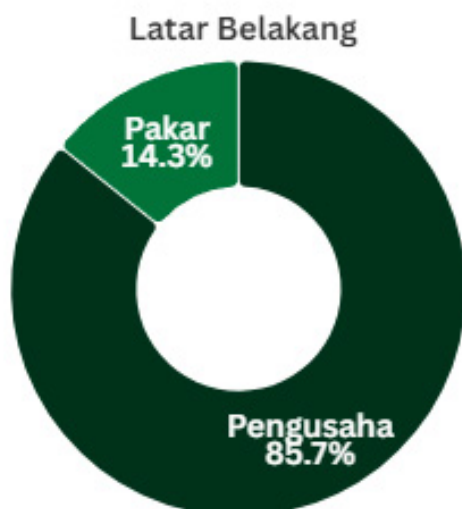


n = 35

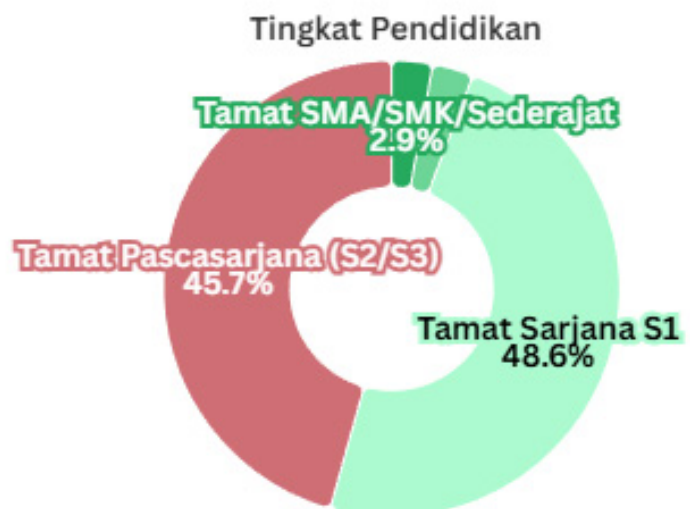


**SUAR** SOLUTION JOURNALISM  
69-EXECUTIVES

## Profil Narasumber



n = 35



**SUAR** SOLUTION JOURNALISM  
69-EXECUTIVES



# Hendri Saparini: Jadikan MBG sebagai Hub Program Pemerintah



*Dr. Hendri Saparini, ekonom senior pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. (Foto-foto: SUAR/Ahmad Afandi)*

Ekonom Senior Hendri Saparini menggarisbawahi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tiga hal. Pertama, harus jelas target yang disasar. Kedua, program ini bisa menjadi “hub” bagi program pemerintah lainnya. Terakhir, pelaksanaannya didesentralisasikan

Penulis: Gianie

*Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah disorot publik karena maraknya kasus keracunan setelah murid sekolah menyantap menu MBG. Kondisi yang mengarah pada Kejadian Luar Biasa ini menuntut evaluasi menyeluruh agar kasus tidak meluas atau berulang.*

*Pertengahan September lalu, berkenaan dengan Survei Semesta Dunia Usaha, tim SUAR mewawancarai ekonom senior sekaligus pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini mengenai program MBG ini.*



*Berikut petikan wawancaranya.*

### ***“Apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan sesuai yang diharapkan?”***

Pelaksanaan program MBG harus jelas target yang disasar. Apakah untuk semua anak yang bersekolah atau kalau untuk perbaikan gizi apakah diberikan untuk anak sekolah yang kurang gizi. Kejelasan ini akan menentukan apakah pelaksanaan sudah tepat sasaran dan bagaimana penganggaranannya dan evaluasinya.

Agar tepat sasaran dan penggunaan anggaran lebih efisien, di praktik banyak negara, program pemberian

makan gratis seperti ini diperuntukkan bagi anak yang membutuhkan. Bagi anak yang tidak menjadi target karena tidak membutuhkan dapat mengikuti program dengan membayar.

Dalam kondisi Indonesia seperti sekarang yang mengalami keterbatasan fiskal, target program makan siang gratis sebaiknya ditujukan bagi anak yang membutuhkan agar tepat sasaran dalam memperbaiki status gizi.

*Program MBG harus bisa menjadi 'hub' bagi program pemerintah yang lain. Mulai dari penyedia bahan makanan hingga penciptaan lapangan kerja.*

## **“Dalam pelaksanaannya, apakah penyediaan makanan untuk program MBG ini sudah memberdayakan UMKM?”**

Menilai MBG tidak bisa parsial. Yang juga penting dalam program MBG adalah memetakan siapa saja pihak yang terlibat/dilibatkan dalam pelaksanaan. Program MBG harus bisa menjadi 'hub' bagi program pemerintah yang lain. Mulai dari penyedia bahan makanan (terutama pangan lokal), hingga penciptaan lapangan kerja baik itu melalui pengembangan UMKM maupun koperasi, atau lainnya. Dengan demikian, program MBG memiliki dampak berganda (multiplier effect)

yang sangat besar.

Hal itu karena program MBG tidak bisa dilihat secara parsial atau sepotong-sepotong. Soal pemberian makanan bergizi ini tidak semata menyangkut program kesehatan atau pendidikan. Tetapi juga terkait dengan program pangan (pertanian), pengolahan bahan makanan (industri) dengan pelaku baik usaha kecil dan menengah, maupun besar, hingga terkait penciptaan lapangan kerja.

## **“Apa yang menjadi kelebihan atau manfaat utama dari program MBG ini?”**

Selain untuk memperbaiki kondisi gizi anak, penyediaan makanan gratis secara ekonomi akan meningkatkan permintaan dan pasokan. Dengan demikian, perekonomian akan bertumbuh mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

Dengan banyaknya pelaku-pelaku yang dilibatkan dalam program MBG dan sebaran target yang sangat luas, program MBG ini sebaiknya dilakukan secara berjenjang (didesentralisasikan)

untuk benar-benar dekat ke kelompok bawah atau dekat dengan anak-anak yang menjadi penerima manfaat. Pelaksanaannya sebaiknya sampai di unit terkecil, misalnya, hanya melayani 150-200 paket makanan per hari. Sehingga, kualitas gizi dan keamanan makanan tetap terjaga. Jika pengelola menghandle porsi yang sangat besar, risiko atau kesulitannya juga akan besar, selain ongkos produksi juga akan lebih besar.



## ***“Faktor apa yang harus diperhatikan agar program ini bisa berjalan dengan baik?”***

Dengan banyaknya kasus keamanan makanan seperti keracunan yang terjadi di banyak daerah, program MBG harus dievaluasi dan bertransformasi dengan menekankan pada pelayanan penyajian makanan yang bervariasi dan semakin dekat ke penerima manfaat. Dengan demikian risiko-risiko bisa ditekan.

Jika penyedia makanan (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG-red) sangat dekat dengan sekolah penerima manfaat, anak sekolah masih bisa menerima makanan yang segar. Buah potong, misalnya, jika distribusinya terlalu jauh, kondisi buah potong sudah sangat

mengkhawatirkan, sudah tidak segar. Begitu juga dengan makanan yang berkuah.

Dalam program ini, siapa saja atau pihak mana saja bisa ambil peran, termasuk swasta. Tak terkecuali orang tua dan guru di sekolah. Yang perlu digarispawahi, dalam setiap rantai distribusi makanan gratis, siapa pun bisa membantu pelaksanaan program MBG.

Perlu pemetaan mana saja sekolah yang berhak menerima dan lokasinya di mana. Lalu ditawarkan baik ke swasta atau lembaga sosial lainnya siapa yang bisa membantu. Bisa saja

# Pembenahan Program MBG: Perlu Mapping dan KPI



*Siswa menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 50 Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa(30/9/2025). Foto: Antara/Andri Saputra/tom).*

Pemetaan (mapping) serta pengawasan dan evaluasi menggunakan indikator-indikator kinerja kunci atau key performance indicators (KPI) penting dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG.

Penulis: Gianie

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan karena dua masalah utama, yaitu kualitas dan distribusi. Untuk membenahinya harus dimulai dari pemetaan (mapping) serta pengawasan dan evaluasi menggunakan indikator-indikator kinerja kunci atau key performance indicators (KPI).

Survei Semesta Dunia Usaha pada bulan September 2025 memotret pelaksanaan MBG dari kaca mata para pengambil keputusan di perusahaan dan pengamat ekonomi. Total sebanyak 35 orang yang menjadi narasumber. Secara umum, para narasumber menekankan perlunya program MBG dikelola secara profesional.

Secara konsep, program MBG dipandang ambisius: menyedot anggaran besar dan dampaknya juga besar. Tetapi, eksekusinya belum sesuai ekspektasi.

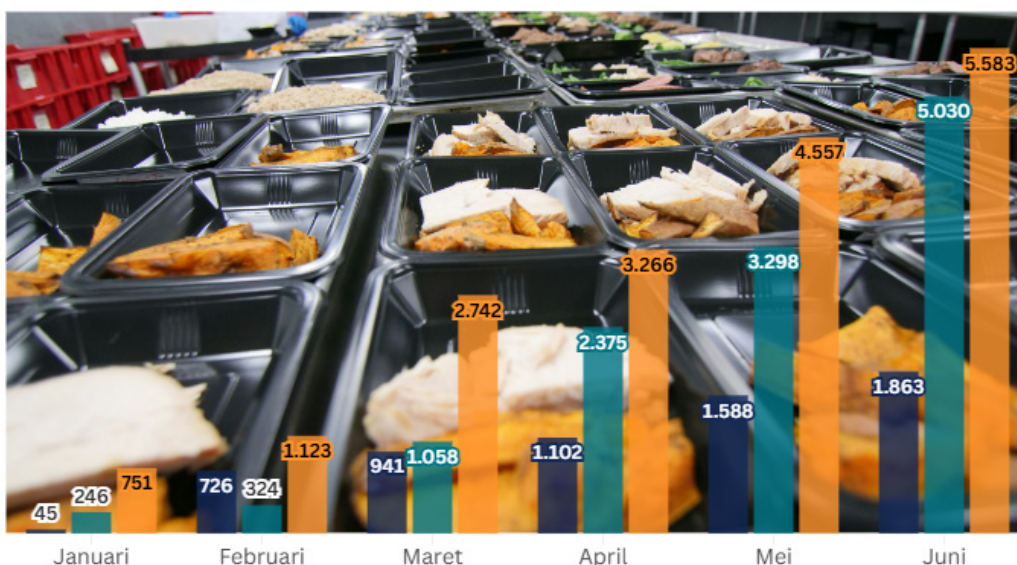
Hingga akhir September, program MBG sudah menjangkau 32 juta penerima manfaat dan memberdayakan lebih dari 9.000 unit mitra pemerintah yang bertugas sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dua hal terkait pelaksanaan MBG yang perlu menjadi perhatian serius adalah soal kualitas dan distribusinya.

Dari segi kualitas, program ini menghadapi persoalan jatuhnya korban anak didik akibat keracunan makanan. Jumlahnya hampir 6.000 orang, sehingga digolongkan sebagai kejadian luar biasa. Di sisi lain, distribusi makanan terkendala karena jangkauannya luas, persebarannya belum merata.

Oleh sebab itu harus jelas target prioritas penerima manfaat. Target bisa menjangkau seluruh Indonesia lebih bagus, tapi pada awalnya harus fokus pada yang membutuhkan.

## Realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025

■ SPPG (miliar rupiah) ■ Realisasi (miliar rupiah) ■ Penerima manfaat (juta orang)



Sumber: Laporan APBN Kita, Kementerian Keuangan. • Diolah Tim SUAR/Ratri.

- Target penerima manfaat MBG di tahun 2025 ditambah mencapai 82,9 juta yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

- Kesiapsiagaan anggaran tambahan pemerintah sebesar Rp100 triliun.

Foto: Richard R.- Unsplash

**SUAR** SOLUTION JOURNALISM  
OF EXECUTIVES



# Mapping awal

Masalah kualitas dan distribusi dalam program MBG bisa diurai dengan melakukan pemetaan atau mapping terlebih dahulu.

Pertama, pemetaan terkait penerima manfaat MBG. Target MBG tidak perlu ditujukan kepada semua anak Indonesia, tetapi fokus pada yang betul-betul membutuhkan.

Di praktik banyak negara, program pemberian makan gratis seperti ini diperuntukkan bagi anak yang membutuhkan. Bagi anak yang tidak menjadi target karena tidak

membutuhkan dapat mengikuti program dengan membayar.

Hal ini terkait pembiayaan atau dana, karena juga ada program-program lain yang merupakan prioritas juga membutuhkan dana besar.

Meski program MBG berskala nasional, hanya daerah-daerah yang sangat membutuhkan atau daerah yang sangat miskin yang seharusnya menjadi prioritas. Hal ini untuk meneguhkan negara benar-benar hadir bagi yang membutuhkan.

*Meski program MBG berskala nasional, hanya daerah-daerah yang sangat membutuhkan atau daerah yang sangat miskin yang seharusnya menjadi prioritas.*

Kedua, terkait dengan pihak-pihak yang menjalankan program MBG. Pemerintah perlu memetakan sumber daya manusia yang terlibat dalam semua proses pelayanan program dari hulu ke hilir. Dunia usaha bisa diintegrasikan ke dalam mata rantai pasok supaya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk MBG tersedia dengan cukup.

Pemerintah perlu mengandeng swasta dalam koordinasi dan tata kelolanya yang bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Dengan mapping, pelaksanaan MBG tidak top-down dari pusat. Ongkos produksi pun bisa ditekan bila dalam pengadaan barang atau kebutuhan langsung dari tangan pertama – petani atau nelayan.



*Sejumlah petugas SPPG menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Tunggala Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (29/9/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah/rwa.*

## Kolaborasi dan koordinasi

Pelaksanaan MBG butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Sebab, program ini sebetulnya berhubungan dengan koperasi, pertanian, perdagangan, bisa juga dari perindustrian untuk olahan makanan dan minuman. Seperti perusahaan yang memiliki SOP, program MBG ini SOP-nya belum jelas dalam melibatkan banyak pihak tersebut.

Banyak UMKM di daerah, yang sudah terbiasa dengan SOP yang baik, bisa dilibatkan. UMKM bisa menjadi pemasok dapur-dapur MBG, tapi itu belum terlihat ada koordinasi yang baik. Inisiatif-inisiatif akan muncul karena infrastruktur yang sudah ada di daerah.

Di daerah-daerah, infrastruktur untuk mendukung program MBG sudah banyak, seperti BUMDes, Koperasi

Unit Desa, Koperasi Usaha Bersama, dan sebagainya. Apakah mereka akan dikonsolidasikan atau berkompetisi, itu yang belum jelas. Infrastruktur untuk MBG ini harus dimanfaatkan sebagai fondasi yang kuat untuk menopang kelancaran pelaksanaan MBG.

Dengan mengikuti kekuatan daerah, pada akhirnya program MBG akan menggerakkan perekonomian lokal, termasuk pangan lokal. Dengan memanfaatkan kekuatan aset di masing-masing daerah, pelaksanaan MBG bisa lebih efisien dan efektif. Prinsipnya adalah menggunakan dan memberdayakan aset-aset yang sudah ada ketimbang memulai dari nol yang sangat baru.

Program ini harus bisa memberi nilai tambah ketika memproduksi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan MBG. Dan, itu harus bebas dari kendala

administrasi dan birokrasi. Di sini pentingnya koordinasi antarpihak yang berkepentingan.

*Di daerah-daerah, infrastruktur untuk mendukung program MBG sudah banyak, seperti BUMDes, Koperasi Unit Desa, Koperasi Usaha Bersama, dan sebagainya.*

## Monitoring pelaksanaan

Setelah mapping penerima manfaat dilakukan berdasarkan prioritas dan koordinasi lapangan dijalankan, agar pelaksanaan program MBG bisa berkelanjutan bergantung pada kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Monev didasarkan pada sejumlah indikator-indikator kinerja kunci atau key performance indicators (KPI), seperti halnya yang dijalankan di perusahaan.

Indikator ini dirumuskan bersama mengacu pada banyak aspek yang ingin dicapai. Tidak hanya didasarkan pada indikator kualitas. Jika ini dilakukan secara transparan, masyarakat Indonesia bisa lebih percaya dan akan bergotong-royong

untuk menyelesaikan proyek yang bagus ini.

Dari pemikiran para narasumber dari dunia usaha ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah kualitas harus dengan mapping dan monev. Sedangkan untuk mengatasi masalah distribusi bisa dilakukan melalui koordinasi atau kolaborasi antarpihak hingga ke daerah. Inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan program-program yang dilakukan pemerintah.